

# **FORMULASI HUBUNGAN ORGANISASI SAYAP PARTAI POLITIK DENGAN PARTAI POLITIK DI INDONESIA**

Ali Rido

## **Abstrak**

Fenomena yang sering terjadi terkait organisasi sayap partai di Indonesia, salah satunya ialah mundurnya sejumlah anggota sayap partai dari organisasi karena berseberangan pemikiran dengan partainya. Hal itu, menunjukkan partai tidak mampu mengkonsolidasikan keberadaan organisasi sayapnya sehingga yang timbul ketidakharmonisan hubungan antar keduanya. Agar tidak terus berlanjut praktek demikian, maka penting dicarikan formulasi pola hubungan yang harmonis. Salah satu cara yang dapat ditempuhnya, ialah dengan belajar pada negara lain, seperti Inggris dan Rumania. Dari dua negara tersebut, terlihat pola hubungan organisasi sayap dengan partai didasarkan pada manajemen kepartaian yang modern sehingga layak untuk diformulasikan pada hubungan partai dengan organisasi sayapnya di Indonesia. Formulasi ideal dalam membangun hubungan harmonis antar keduanya, ialah partai politik di Indonesia harus mengedepankan prinsip transparansi, partisipasi, meritokrasi-berjenjang dalam kandidasi pejabat publik, dan pembangunan militansi melalui kaderisasi.

Kata kunci: hubungan, partai politik, dan organisasi sayap partai.

## **Abstract**

*The phenomenon that occurred was related to the organization of the under bow party in Indonesia, including the withdrawal of party members. The event showed that the party could not consolidate the existence of its organization. So, that there is disharmony between the under bow party and political parties. Therefore, it is important to find a harmonious relationship pattern. Studying in other countries, such as Britain and Romania, shows a pattern of party relations with modern management that can be formulated in Indonesia. The formulation, political parties have to practice the principles of transparency, participation, meritocracy in the candidacy of public officials, and regeneration.*

*Keywords: Relationship, political party, underbow party.*

## **PENDAHULUAN**

Diskusikan tentang organisasi sayap partai politik (parpol), tidak dapat dilepaskan dari fungsi-fungsi organisasi sayap parpol itu sendiri yang berjalan dalam suatu tubuh kepartaian di suatu negara. Dalam sistem politik demokrasi, tentu terdapat banyak fungsi yang melekat kepada organisasi sayap parpol dan salah satunya ialah fungsi membangun hubungan interaksi dan komunikasi

dengan parpolnya. Fungsi ini merupakan yang paling banyak dilaksanakan oleh organisasi sayap partai, sebab tanpa adanya interaksi dan komunikasi yang baik, parpol kesulitan dalam mentransfer ideologi dan gagasan kepartaian pada lapis bawah seperti organisasi sayap partai. Hubungan yang baik antara organisasi sayap partai dengan parpol, semestinya dilakukan dengan baik dalam membumikan kepentingan parpol itu sendiri. Sebab, melalui proses interaksi yang baik, maka parpol dalam melakukan *sharing* gagasan dapat diterima secara baik pula sehingga ada ketersambungan dalam implementasi gagasan parpol.<sup>1</sup>

Interaksi yang baik antara organisasi sayap parpol dengan parpol, juga seyogianya pula dipraktekan di Indonesia. Sebagai negara yang telah mendedahkan diri sebagai negara demokrasi dengan sistem multi partainya, maka hubungan antar organisasi sayap partai dan parpol menjadi bagian penting dalam peta jalan (*road map*) parpol guna membumikan program, gagasan dan ideologi parpol ke lapisan masyarakat. Sayangnya dalam ranah empiris Indonesia, pola hubungan organisasi sayap partai dengan parpol dihiasi ketidakharmonisan. Hal ini, sebagaimana dapat dilihat antara lain fakta mundurnya sejumlah pengurus organisasi sayap Partai Nasional Demokrat karena merasa idealisme yang diperjuangkan partai tersebut telah berubah.<sup>2</sup> Hal yang sama, juga dilakukan pengurus Dewan Pengurus Wilayah (DPW) Pemuda Partai Persatuan Indonesia (Perindo) di Daerah Istimewa Yogyakarta.<sup>3</sup> Alasan pengunduran diri, disebabkan karena adanya larangan dari pengurus pusat Perindo yang melarang anggota organisasi sayap partai untuk mendukung pasangan calon tertentu dalam pemilihan presiden.

Dua contoh di atas, seharusnya tidak terjadi jika hubungan maupun komunikasi parpol dengan organisasi sayapnya dijalin dengan baik. Namun di satu sisi, hal tersebut menunjukkan adanya permasalahan serius dalam pola hubungan

---

<sup>1</sup> Redatin Parwadi, Kaderisasi Organisasi Dalam Perubahan, *Jurnal Wawasan*, Volume 12, Nomor 1, Juni 2006, hlm. 2-3.

<sup>2</sup> Lihat Sejumlah Pengurus dan Sayap Partai Nasdem Mundur, <https://www.republika.co.id/berita/nasional/politik/13/01/29/mhe459-sejumlah-pengurus-dan-sayap-partai-nasdem-mundur>, diakses pada tanggal 26 Maret 2019.

<sup>3</sup> Ramai-ramai Undurkan Diri dari Sayap Partai, Ketua DPW Pemuda Perindo DIY: Karena Dilarang Dukung Pak Jokowi, <https://infonawacita.com/ramai-ramai-undurkan-diri-dari-sayap-partai-ketua-dpw-pemuda-perindo-diy-karena-dilarang-dukung-pak-jokowi/>, diakses pada tanggal 26 Maret 2019.

atau interaksi antara organisasi sayap partai dengan parpolnya sehingga anggota organisasi sayap parpol dengan mudah bersebarangan dengan parpol yang merupakan wadah bernaungnya. Apabila hal itu dibiarkan, maka akan mengancam peran parpol itu sendiri mengingat organisasi sayap partai memiliki peran strategis dan sentral terhadap keberadaan parpol. Dalam optik keilmuan, setidaknya terdapat 3 (tiga) peran strategis organisasi sayap parpol: 1) organisasi sayap partai politik sangat strategis dalam menghubungkan antara partai politik dengan kelompok pemilih yang dapat berbentuk organisasi perempuan, pemuda maupun mahasiswa, serikat buruh, organisasi keagamaan dan organisasi sosial yang lain; dan 2) peran organisasi sayap partai politik ini dapat membantu peran partai politik dalam mengartikulasikan dan mengagregasikan aspirasi masyarakat atau dapat juga mempengaruhi kebijakan-kebijakan partai politik.<sup>4</sup>

Perpektif lain, maka peran dari organisasi sayap partai ialah: 1) menjadi penghubung atau penyabung antara kepentingan partai politik dengan pemilih atau konstituen; 2) melaksanakan program kerja partai politik yang secara umum tidak dapat dijangkau oleh struktur inti dalam partai politik; 3) menjembatani kepentingan konstituen dengan partai politik sehingga memberi kemudahan dalam membangun komunikasi politik.<sup>5</sup> Terhadap peran sentral organisasi sayap partai tersebut, maka dengan adanya fenomena pengunduran diri anggota sayap partai seperti di atas tentu mengkhawatirkan. Di samping itu, juga akan mengancam tidak tersalurkannya secara efektif proses kaderisasi yang merupakan salah satu tujuan dalam sistem berpolitik partai. Sebagaimana dikatakan Petit, bahwa: "*politics is a variety of political systems that involve the process of determining the objectives of the system and implementing these objectives.*"<sup>6</sup> [terj: Politik merupakan ragam kegiatan di dalam sistem politik yang menyangkut proses menentukan tujuan-tujuan dari sistem dan melaksanakan tujuan-tujuan tersebut]. Dalam menentukan tujuan politik tersebut, maka salah satu yang dibutuhkan

---

<sup>4</sup> Sunarlan, Peran Organisasi *Under Bouw* Partai Politik Di Indonesesia, *Makalah* disampaikan dalam seminar yang diselenggarakan oleh PUSKAPSI yang bekerjasama dengan Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia di Hotel Aston, 3 Mei 2017, hlm. 5.

<sup>5</sup> M. Rusli Karim, *Perjalanan Partai Politik Indonesia, Sebuah Potret Pasang Surut*, Rajawali Pers, Jakarta, 1993, hlm. 31.

<sup>6</sup> Phillip Petit, *Republicanism: A Theory Of Freedom And Government*, Clarendon Press, Oxford, 2002, hlm. 280.

adalah pola hubungan yang efektif antara organisasi sayap partai dengan parpolnya.

Berdasarkan hal di atas, menjadi penting untuk dicarikan jalan keluar berkenaan dengan pola hubungan organisasi sayap partai dengan parpol. Mengapa pada aspek interaksi atau hubungan yang menjadi fokusnya, karena didasarkan pada 2 (dua) alasan. *Pertama*, interaksi atau hubungan merupakan pintu masuk paling awal dalam mensukseskan berbagai agenda yang telah disusun oleh parpol. Hal ini mengingat secara teoritis, organisasi sayap partai merupakan perpanjangan tangan dari parpol. Karenanya, agar terus terbangun simbiosis mutualisme maka pola hubungan yang baik harus dilakukan. *Kedua*, pola interaksi yang dipraktekan oleh parpol di Indonesia masih banyak yang menggunakan metode *top down* sehingga organisasi sayap partai diposisikan sebagai objek bukan subjek untuk mendukung kepentingan partai.<sup>7</sup>

Berdasarkan uraian permasalahan di atas, maka penting dilakukan pencarian solusi yang salah satunya dengan belajar pada negara lain yang dari segi kelembagaan kepartaiannya telah mapan. Adapun negara yang dipilih, ialah Inggris dan Korea Selatan. Terdapat alasan dipilihnya dua negara tersebut, yaitu: *pertama*, Inggris merupakan negara yang dapat dikatakan organisasi kepartaiannya telah mapan. Parpol di negara tersebut, juga dapat dinilai telah memiliki sistem organisasi kepartaian yang "matang" dengan sumber daya yang relatif terkelola dengan baik.<sup>8</sup> Melalui pembelajaran pada negara dengan kematangan organisasi kepartaiannya tersebut, diharapkan dapat mengambil sisi positif hubungan antara organisasi sayap partai dengan parpol sehingga kemudian dapat diimplementasikan terhadap pola hubungan organisasi sayap partai dengan parpol di Indonesia.

---

<sup>7</sup> Syamsuddin Haris, (ed.), *Pemilu Langsung di Tengah Oligarki Partai: Proses Nominasi dan Seleksi Legislatif Pemilu 2004*, Gramedia, Jakarta, 2005, hlm. xvii.

<sup>8</sup> Sistem organisasi partai dan pengelolaan sumber daya partai yang baik merupakan salah satu indikator dari tiga indikator lain dalam pelembagaan sistem kepartaian menurut Mainwaring dan Scully. Tiga indikator lainnya adalah pola kompetisi partai yang stabil, hubungan partai politik yang kuat dengan masyarakat, dan partai politik terlegitimasi sebagai elemen demokrasi yang penting. Lihat selengkapnya dalam S. Mainwaring & T. R. Scully, *Building Democratic Institutions: Party Systems in Latin America*, Stanford University Press, Stanford, CA, 1995, hlm. 4.

Alasan *kedua*, dipilihnya Rumania ialah karena negara tersebut dapat dikatakan sebagai negara yang relatif baru dalam mempraktekan demokrasi layaknya Indonesia. Kebaruan praktek berdemokrasi, tentu merambah pada sisi organisasi kepartaian yang ada di negara tersebut. Oleh karena itu, dengan mengambil pembelajaran pada Rumania diharapkan dapat merekam terkait upaya membenahan kelembagaan parpol (organisasi sayapnya) di tengah problematika transisi demokrasi seperti di Indonesia. Level kemiripan tersebut, nantinya sebagai upaya perbandingan pencarian ideal hubungan organisasi sayap partai dengan parpol.

## **PEMBAHASAN**

### **1. Hubungan Organisasi Sayap Partai dengan Partai Politik: Belajar dari Inggris dan Rumania**

Sebagaimana dapat dibaca dalam referensi ilmiah, Inggris dapat dikatakan merupakan salah satu negara yang memiliki struktur partai yang agak rumit. Hal ini sebagaimana terekam dalam uraian Sanders berikut:

*"The UK has always had a rather more complex party structure, than the simple two or two-and-a-half party system typically used by comparative political analysts to characterise the Westminster parliament".<sup>9</sup>*

Kerumitan tersebut, menurut Clark disebabkan karena faktor:<sup>10</sup> 1) *the existence of multi parties with strongest ideologies in each party* [terj. adanya multi partai dengan ideologi yang sangat kuat di masing-masing partai; 2) *the role of small parties that sometimes determines in general elections –The Liberal Democratic Party-* [terj. peranan partai kecil seperti Partai Liberal Demokrat yang kadang kali menentukan dalam pemilihan umum, seperti Partai Liberal Demokrat].

Sekalipun memiliki kerumitan dalam struktur kepartaiannya, namun dari semua lini penataan internal kepartaian memiliki pedoman yang jelas.<sup>11</sup> Salah

---

<sup>9</sup> David Sanders, *The UK's Changing Party System: The Prospects For A Party Realignment* at Westminster, *Journal of the British Academy*, 5, 2017, hlm. 93.

<sup>10</sup> Alistair Clark, *Political Parties in the UK*, Palgrave Macmillan, England-Basingstoke, 2012, hlm. 23.

<sup>11</sup> Sebagai catatan, Partai Buruh dan Partai Konservatif adalah partai dominan di Inggris yang mempunyai pandangan tidak jauh berbeda mengenai asas dan tujuan politiknya. Selain partai ini, beberapa partai kecil lainnya juga menghiasi dunia perpolitikan Inggris. Seperti Partai Liberal Demokrat yang merupakan partai paling berada di "sayap kiri" di antara kesemuanya. Kemudian ada Partai Buruh yang beraliran sayap kiri. Partai Demokrat yang berada di tengah dan selanjutnya Konservatif yang memiliki pandangan "kanan" dan disusul UKIP (*United Kingdom Independent Party*) yang paling berada di sayap kanan. Selain berasal dari

satu kejelasan pedoman tersebut, ialah pada pola hubungan dengan organisasi sayap partainya. Pada lingkup hubungan tersebut, oleh partai di Inggris dilakukan dengan jalan interaksi yang elegan sehingga kebijakan parpol dapat diterima oleh organisasi sayapnya (*underbow*).<sup>12</sup> Dalam menjaga kemesraan hubungan organisasi sayap partai, parpol di Inggris melakukan dengan beberapa cara. Baik Partai Buruh dan Partai Konservatif, dalam menjalin hubungan dengan organisasi sayapnya ialah dengan melibatkannya dalam pemilihan pengurus yang menggunakan model konvensi.<sup>13</sup> Bahkan untuk model konvensi yang digunakan oleh Partai Buruh jika menggunakan metode *voting*, maka 1/3 suara diberikan kepada pengurus lama, anggota partai, dan anggota organisasi sayap partai untuk menentukan pengurus partai.<sup>14</sup>

Cara lainnya, ialah dalam penentuan anggota parlemen. Mayoritas partai di Inggris menentukan bahwa yang dapat maju untuk mencalonkan diri sebagai kandidat untuk anggota parlemen harus dari organisasi partai –baik pengurus atau organisasi sayap- “murni”. Artinya, sulit bagi seseorang yang baru memperoleh kartu anggota satu atau dua bulan langsung dapat masuk dalam bursa pemilihan yang diusung oleh partai. Dengan kata lain, maka hanya individu-individu militan dan telah lama berjuang dengan partai yang maju dalam jabatan publik. Hal ini, sebagaimana yang terlihat dalam aturan Partai

---

partai-partai tersebut, ada pula partai-partai nasional (*National Party*) misalnya *Scottish National Party* atau SNP. Posisi partai-partai ini, dalam kompas politik juga sangat mempengaruhi kebijakan yang mereka perkenalkan ketika menjabat. Partai-partai yang beraliran “sayap kiri” akan lebih sosialis dalam pemikiran dan tindakan mereka, demikian pula partai yang berada di “sayap kanan” akan sesuai dengan ideologinya. Meskipun begitu, sesuai dengan kepentingan nasional, partai-partai ini juga sangat mungkin mengubah ciri kebijakannya saat diperlukan. Salah satu contohnya adalah Partai Buruh yang beberapa tahun sebelum ini cukup mengambil kebijakan “sayap kanan” untuk mengatasi berbagai permasalahan. Demikian pula, tindakan individu dalam partai juga dapat saja berbeda dengan pemikiran partai. Selain itu, ada pula sebuah partai politik unik yang tidak mempunyai kursi di parlemen, namun memiliki beberapa kandidat yang terpilih sebagai pemerintah lokal, seperti *Official Monster Raving Loony Party* yang terdiri dari orang-orang eksentrik dengan pakaian yang luar biasa aneh dan berwarna-warni. Duncan Watts, *US/UK Government and Politics*, Manchester University Press, Manchester, 2003, hlm. 179. Baca juga E. Kridhaswari, *Sistem Politik di Inggris*, dalam

<http://repository.umy.ac.id/bitstream/handle/123456789/18717/f.%20BAB%20II.pdf?sequence=6&isAllowed=y>, diakses pada tanggal 06 April 2019.

<sup>12</sup> Organisasi sayap partai di Inggris, antara lain yaitu *Young Labour*, *Disability Labour*, *Conservative Co-operative Movement*, dan *Conservative Muslim Forum*. Baca selengkapnya List of 'Conservative' Organizations, dalam [https://www.sourcewatch.org/index.php/List\\_of\\_%27conservative%27\\_organizations](https://www.sourcewatch.org/index.php/List_of_%27conservative%27_organizations) dan List of Organisations Associated with the British Labour Party, dalam [https://infogalactic.com/info/List\\_of\\_organisations\\_associated\\_with\\_the\\_British\\_Labour\\_Party](https://infogalactic.com/info/List_of_organisations_associated_with_the_British_Labour_Party), keduanya diakses pada tanggal 05 April 2019.

<sup>13</sup> *Labour Party Rule Book 2013*, dalam [www.labourparty.org](http://www.labourparty.org), diakses pada tanggal 05 April 2019.

<sup>14</sup> *Ibid.*,

Buruh dan Partai Liberal Demokrat di Inggris yang mensyaratkan bahwa setiap calon legislatif (caleg) harus telah menjadi anggota partai baik pengurus maupun berkiprah di organisasi sayap selama minimal 12 (dua belas) bulan berturut-turut.<sup>15</sup>

Adanya persyaratan tersebut, menurut salah satu pengurus Partai Liberal Demokrat, Nick Clegg ialah dalam rangka perbedayaan. Pernyataannya lengkapnya ialah sebagai berikut:

*".....membership requirements are an important factor for prospective public officials. Public officials who advance in the election must be individuals from within the party, starting from the underbow party. The aim is to empower the party internally so that it can maintain member loyalty in managing the party."*<sup>16</sup> [terj. ....persyaratan keanggotaan merupakan faktor penting bagi calon pejabat publik. Pejabat publik yang maju dalam pemilihan merupakan individu dari internal partai, mulai dari organisasi sayap partai. Tujuannya untuk memberdayakan internal partai sehingga dapat menjaga loyalitas anggota dalam mengurus partai].

Pernyataan Clegg di atas, terdapat spirit dalam membangun partai harus mengutamakan kader yang telah lama dan teruji militansi untuk kemudian diajukan dalam kontestasi pemilihan. Hal tersebut, tentu memiliki nilai positif mengingat partai akan memprioritaskan kadernya lebih dulu dan telah terlihat rekam jejaknya. Pada konteks itu, bagi partai sejatinya akan dengan mudah memberikan garansi baik buruknya seseorang yang akan maju dalam pemilihan atau untuk duduk pada jabatan publik. Selain itu, dengan memprioritaskan kader maka berdampak pada psikologis kader -khususnya kader organisasi sayapnya- bahwa dedikasi terhadap partai memang betul-betul dihargai. Pada konteks itu, maka dapat dibaca sebagai salah satu cara yang efektif untuk membangun hubungan harmonis antara parpol dengan organisasi sayapnya.

Hal yang sama, juga dipraktekan di Rumania oleh Partai Sosial Demokrat (*The Social Democrat Party*) dan Partai Nasional Liberal (*The National Liberal Party*), di mana kandidat yang boleh mencalonkan menjadi anggota parlemen

---

<sup>15</sup> The Green Party for a Confident and Caring Britain, dalam <https://www.greenparty.org.uk/assets/files/gp2017/greenguaranteepdf.pdf>, diakses pada tanggal 05 April 2019.

<sup>16</sup> Interview yang dilakukan oleh *BBC Three* dan diupload dalam akun resmi youtubanya. Nick Clegg, why should young people trust you?, dalam <https://www.youtube.com/watch?v=nBXzVSqM0-Y>, diakses pada tanggal 05 April 2019.

harus anggota (kader) partai aktif; yang diakui oleh bagian SDM partai; telah diakui sebagai kader yang militan; dan sudah mengalami jenjang karir di parpol dengan hasil penilaian (evaluasi) yang baik.<sup>17</sup> Maksud anggota partai aktif di Rumania, termasuk di dalamnya merupakan organisasi yang tidak memiliki garis langsung dengan kepengurusan partai, seperti organisasi sayap partai atau yang disebut sebagai *aripă de partidul*.<sup>18</sup> Dalam ulasan Horia-Alin Lupu, menyebutkan bahwa:

*Social democratic party, that involve their wings party in nominating public office are the initial stages to assess whether a person is eligible to be elected.... as a candidate for public officials must go through the selection stage to the party's decision.*<sup>19</sup> [terj. partai sosial demokrat yang melibatkan sayap partainya dalam kandidasi jabatan publik merupakan tahap awal untuk menilai layak tidaknya seseorang untuk dipilih.... sebagai calon pejabat publik dan atau anggota parlemen harus melalui beberapa tahap dan seleksi hingga nantinya menghasilkan keputusan partai].

Keputusan parpol dalam menyeleksi/menerima kandidat untuk pemilihan umum parlemen tersebut terbagi menjadi dua level:<sup>20</sup> 1) level lokal (daerah): pada level ini delegasi di tingkat lokal memiliki wewenang untuk menyetujui dan mengirimkan hasil validasi data calon yang sudah permanen dalam pemilihan parlemen; dan 2) level pusat: pada level ini disusun oleh dua struktur partai utama: delegasi permanen parpol dan biro politik pusat. Delegasi permanen melakukan validasi proposal dari biro politik pusat mengenai daftar calon yang diusulkan. Kemudian, komisi etika sebagai pihak yang mungkin diperlukan oleh biro politik sentral, melakukan analisis dan kemudian menyetujui atau menolak nama calon dalam pemilihan parlemen Eropa.

---

<sup>17</sup> Syamsuddin Haris, et.,al, *Panduan Rekrutmen dan Kaderisasi Partai Politik Ideal di Indonesia*, Direktorat Pendidikan dan Pelayanan Masyarakat Kedepujian Pencegahan, Komisi Pemberantasan Korupsi Bekerja sama dengan Pusat Penelitian Politik, Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia, Jakarta, 2016, hlm. 32.

<sup>18</sup> Adapun organisasi sayap partai di Rumania, antara lain yaitu *Community of the Lippovan, Cultural Union of Ruthenians*, dan *Hellenic Union of Romania*. Baca selengkapnya Sergiu Gherghina, The Romanian Political System aafter 1989, dalam [https://www.ios-regensburg.de/fileadmin/doc/SOE/SOE\\_2015\\_1\\_Introduction\\_Gherghina.pdf](https://www.ios-regensburg.de/fileadmin/doc/SOE/SOE_2015_1_Introduction_Gherghina.pdf), diakses pada tanggal 06 April 2019.

<sup>19</sup> Horia-Alin Lupu, The Social Democratic Party (PSD) in Romania Within The Framework of The Romanian and European Left. The PSD Manifesto for The 2016 Parliamentarian Elections, dalam [http://neweurope.centre.ubbcluj.ro/wp-content/uploads/2017/10/On-line\\_Journal\\_No\\_23-September\\_2017\\_46-69.pdf](http://neweurope.centre.ubbcluj.ro/wp-content/uploads/2017/10/On-line_Journal_No_23-September_2017_46-69.pdf), diakses pada tanggal 06 April 2019.

<sup>20</sup> Syamsuddin Haris, et.,al, *Panduan Rekrutmen...op. cit.*, hlm. 27.



Melihat cara yang dipraktikkan oleh partai di Inggris dan Rumania, menunjukkan adanya pengutamakan berpartai yang didasarkan pada prinsip partisipasi. Atas dasar prinsip tersebut, maka menjadikan seluruh lapisan organisasi partai memiliki rasa percaya yang tinggi terhadap institusi partai. Kepercayaan tersebut, pada gilirannya menjadi modal bagi institusi partai untuk membangun hubungan yang baik dan berjuang bersama dalam membumikan kepentingan partai atau memenangkan partai pada saat pemilihan umum dilaksanakan. Sebab, organisasi sayap partai memberikan andil besar bagi partai politik baik dalam upaya implementasi, sosialisasi maupun diseminasi program dan kebijakan partai.<sup>21</sup>

Menurut Firmanzah, kemampuan parpol mentransformasikan nilai-nilai kaderisasi ke dalam aturan internal mengenai penjenjangan kader, merupakan bagian penting dalam membina hubungan baik dengan seluruh elemen organisasi partai.<sup>22</sup> Dalam hal ini, tentu organisasi sayap partai juga termasuk bagian dalam lingkaran pembinaan hubungan dengan parpol. Aspek itu, yang diperhatikan secara serius oleh partai di Inggris dengan melakukan pendidikan intensif yang dirumuskan dalam *road map* kaderisasi. Hal ini misalnya dapat dilihat pada Partai Buruh, partai tersebut menerapkan dengan jelas bentuk kaderisasi terhadap para anggotanya. Bentuk kaderisasi yang diterapkan antara lain: partai memberikan pelatihan dan pendidikan khusus mengenai politik kepada seluruh anggotanya, termasuk kepada anggota perempuan dan anggota muda partai.<sup>23</sup> Anggota muda partai, dalam lanskap kepartaian di Inggris termasuk juga organisasi sayap partai (*underbow*).<sup>24</sup> Dengan demikian, arah kaderisasi dan pendidikan tidak hanya diberikan kepada pengurus partai melainkan sampai menyentuh pada organisasi sayap.

---

<sup>21</sup> *Ibid.*, hlm. 54.

<sup>22</sup> Firmanzah, *Mengelola Partai Politik: Komunikasi Dan Positioning Ideologi Politik Di Era Demokrasi*, Edisi Revisi, Yayasan Obor Indonesia, Jakarta, 2008, hlm. 19.

<sup>23</sup> Moshe Maor, *Political Parties & Party Systems: Comparative Approaches & the British Experience*, Routledge, London and New York, 1997, hlm. 21. lihat juga Syamsuddin Haris, et.,al, *Panduan Rekrutmen....op. cit.*, hlm. 32.

<sup>24</sup> Political parties need to better integrate young members and give them the chance to influence policy, dalam [http://eprints.lse.ac.uk/59137/1/\\_lse.ac.uk\\_storage\\_LIBRARY\\_Secondary\\_libfile\\_shared\\_repository\\_Content\\_Democratic%20Audit%20blog\\_2014\\_August%202014\\_democraticaudit.com-Political\\_parties\\_need\\_to\\_better\\_integrate\\_young\\_members\\_and\\_give\\_them\\_the\\_chance\\_to\\_influence\\_policy.pdf](http://eprints.lse.ac.uk/59137/1/_lse.ac.uk_storage_LIBRARY_Secondary_libfile_shared_repository_Content_Democratic%20Audit%20blog_2014_August%202014_democraticaudit.com-Political_parties_need_to_better_integrate_young_members_and_give_them_the_chance_to_influence_policy.pdf), diakses pada tanggal 05 April 2019.

Kaderisasi tentu menjadi sangat penting, karena melalui kaderisasi dapat menjadi pintu komunikasi bagi parpol untuk mentransfer ideologi, gagasan, dan arah kebijakan partai sehingga tidak ada keterputusan informasi dan keinginan partai untuk ditindaklanjuti oleh elemen lapisan bawah partai (sayap partai). Lini penting tersebut, kemudian dilihat oleh partai-partai di Inggris dengan memasifkan kaderisasi dalam bentuk pendidikan dan pelatihan pada seluruh elemen partainya. Bahkan jenis pelatihan yang diberikan memiliki tingkatan dan substansi berbeda, tergantung tujuan dari pelatihan tersebut. Misalnya, ada pelatihan yang diberikan kepada anggotanya dalam rangka menjadi politisi, termasuk bagaimana menjadi pengurus partai maupun kandidat jabatan publik.<sup>25</sup>

Pola keterbukaan (transparansi), juga menjadi cara lanjutan dalam membangun hubungan baik dengan organisasi sayap partai. Baik partai di Inggris maupun di Rumania, mempraktekan hubungan kelembagaan partai yang didasarkan pada mekanisme terbuka dengan membuka diri dalam setiap langkah yang diambil oleh partai. Bahkan, di Inggris kebijakan yang telah ditentukan oleh pengurus inti parpol tidak akan dilaksanakan sebelum dilakukan *sharing* pendapat dengan seluruh lapisan parpol, mulai dari organisasi sayap sampai pada kader. *Sharing* pendapat dilakukan, dalam rangka mencari *feed back* apakah kebijakan yang diambil oleh elit partai telah berkesesuaian dengan kepentingan elemen partai pada lapisan bawah.<sup>26</sup>

Model *sharing* pendapat, penting dilakukan mengingat organ partai pada lapisan bawah yang mengetahui secara pasti kebutuhan dan aspirasi masyarakat. Hal itu disebabkan, organisasi lapis bawah partai, seperti organisasi sayapnya merupakan elemen yang sering berinteraksi dengan masyarakat sehingga mereka yang mengetahui kebutuhan riil masyarakat. Dengan *sharing* pendapat, maka dimaksudkan agar partai tidak salah dalam mengambil kebijakan dan langkah bertindak sehingga tidak kontradiktif dengan aspirasi masyarakat. Pada sisi yang lain, sejatinya dapat dibaca bahwa partai

---

<sup>25</sup> Syamsuddin Haris, et.,al, *Panduan....loc. cit.*,

<sup>26</sup> Alistair Clark, The role of political parties in the UK, dalam [http://ls-tlss.ucl.ac.uk/course-materials/PUBLG043\\_73665.pdf](http://ls-tlss.ucl.ac.uk/course-materials/PUBLG043_73665.pdf), diakses pada tanggal 07 April 2019.

menjaga betul kepentingan konstituen demi untuk tetap memperoleh kepercayaan sehingga dalam pemilu diharapkan akan tetap mendapat suara yang signifikan.

Rumania sebagai kategori negara demokrasi baru, pun menjadikan transparansi sebagai pedoman berpartai walaupun terkesan hanya terbatas pada aspek tertentu. Partai Sosial Demokrat misalnya,<sup>27</sup> akan bersikap terbuka hanya pada kebijakan atau kepentingan yang menyangkut urusan lokal, sementara untuk kebijakan atau kepentingan pusat (nasional) relatif tidak terjadi komunikasi seperti halnya yang dilakukan oleh partai di Inggris. Dapat dikatakan, ketika masuk pada kepentingan pusat maka elit partai atau pengurus inti yang menentukan. Organisasi partai atau non partai pada lapisan bawah, hanya menerima dan diminta mendukung hasil kebijakan yang telah ditentukan.

Sekalipun memiliki perbedaan dalam implementasi prinsip transparansi, namun terlihat kedua partai di dua negara memiliki komitmen untuk tidak menjadi partai yang hanya mengedepankan kepentingan elit atau egoisme elit parpol. Parpol di dua negara tersebut, membuka lebar pintu aspirasi bagi organisasi sayap dan/atau kadernya untuk ikut *urun rembug* terhadap arah kebijakan partai. Pola demikian, tentu menjadikan tidak tersendatnya aliran komunikasi antara partai dan organisasi sayapnya sehingga memicu hubungan baik partai dengan organisasi lapis bawah (seperti organisasi sayapnya).

## **2. Formulasi Hubungan Organisasi Sayap Partai dengan Partai Politik di Indonesia**

Keberadaan organisasi sayap partai, sesungguhnya memiliki peran yang sangat penting jika diberdayakan secara baik. Organisasi sayap partai, dapat menjadi elan vital dalam mengagregasi kepentingan partai karena menjadi "jembatan" yang menghubungkan antara kepentingan partai dengan masyarakat. Organisasi sayap partai memberikan andil besar bagi parpol baik dalam upaya implementasi, sosialisasi maupun diseminasi program dan

---

<sup>27</sup> Alexandra Barbus, The Internal Organization of Romanian Political Parties, dalam [https://www.academia.edu/21090141/The Internal Organization of Romanian Political Parties](https://www.academia.edu/21090141/The_Internal_Organization_of_Romanian_Political_Parties), diakses pada tanggal 07 April 2019.

kebijakan partai. Apabila dikelola dengan baik, organisasi sayap partai dapat memberikan andil besar bagi parpol baik dalam upaya implementasi, sosialisasi maupun diseminasi program dan kebijakan partai. Sebuah organisasi sayap atau *underbow* partai, dapat dikembangkan dan diberdayakan oleh partai politik sebagai instrumen penting untuk menarik simpati dan dukungan massa baik untuk memenangkan pemilihan umum maupun untuk mensosialisasikan kebijakan-kebijakan partai.<sup>28</sup>

Dalam rangka mengoptimalkan peran sayap partai tersebut, maka harus dibangun pola hubungan dengan partainya sehingga tidak menimbulkan persoalan atau keterputusan komunikasi yang berujung pada pengunduran diri pengurus organisasi sayap partai seperti uraian di atas. Belajar dari dua negara yang telah diuraikan di atas, maka terdapat beberapa prinsip yang harus dikedepankan oleh parpol agar tercipta hubungan harmonis dengan organisasi sayapnya. *Pertama*, transparansi. Prinsip ini mengandung arti bahwa parpol harus bersikap terbuka kepada seluruh anggota sayap partai dalam setiap pengambilan kebijakan. Parpol harus membuka diri, seluruh kebijakan partai harus dapat diakses untuk diketahui secara terang benderang oleh anggota sayap partai. Dengan kata lain, kebijakan partai harus menjadi konsumsi bersama antara elit parpol dan organisasi sayap partai sehingga tidak timbul mispersepsi terhadap kebijakan yang diambil oleh elit parpol.

*Kedua*, partisipatif. Maksud dari prinsip ini, parpol dalam pengambilan kebijakan harus terlebih dahulu menyerap aspirasi anggota sayap partai. Sekalipun sayap partai termasuk non anggota parpol, namun dengan memberikan kesempatan untuk *urun rembug* maka menandakan parpol memandang sayap partai sebagai bagian alat perjuangan parpol. Mengapa ini penting?, tentu dapat dikembalikan pada akar pemikiran organisasi sayap partai yang merupakan bagian tidak dapat terpisahkan dari sebuah parpol. Pola pelibatan aktif tersebut, maka mengharuskan parpol untuk merubah diri dari

---

<sup>28</sup> Syamsudin Haris, *Partai, Pemilu dan Parlemen Era Reformasi*, Yayasan Obor Indonesia, Jakarta, 2014, hlm. 31.

model pengambilan kebijakan yang bersifat *top down* ke arah *bottom up*.<sup>29</sup> Dengan cara itu, maka sejatinya parpol telah membangun komunikasi dan hubungan baik dengan organisasi sayap, yang artinya parpol tidak menjadikan organisasi sayap hanya sebagai objek melainkan juga sebagai subjek kepentingan parpol.

*Ketiga*, meritokrasi-berjenjang dalam kandidasi pejabat publik. Prinsip ini mengharuskan parpol untuk memberikan jaminan bahwa semua kader yang telah menjadi anggota parpol maupun anggota sayap partai yang memiliki potensi dan/atau dengan penilaian lain yang telah ditentukan oleh parpol yang sifatnya demokratis dapat mengikuti kontestasi pemilihan jabatan publik. Hal ini menjadi penting, mengingat yang sering menjadi sebab memburuknya hubungan organisasi sayap dengan parpol ialah sikap parpol yang tidak adil dengan memberikan karpet merah pada pesohor, pemodal dan sejenisnya yang notabene bukan kader yang telah lama berjuang untuk partai. Akibatnya, justru yang muncul adalah perwajahan elite parpol karena majunya seorang kandidat parpol untuk kursi jabatan publik didasarkan pada selera elite parpol. Muara dari hal ini fatal, sebab kandidat yang muncul dipaksakan agar diterima publik melalui fatamorgana figur dan kampanye yang manipulatif (*simulacrum campaign*).<sup>30</sup>

*Keempat*, pembangunan militansi melalui kaderisasi. Salah satu kegagalan parpol dalam membangun hubungan atau kemitraan baik dengan organisasi sayapnya, karena sedari awal parpol tidak serius menanamkan militansi atau loyalitas pada anggota sayapnya. Ketidaksiharian itu, disebabkan karena parpol tidak memiliki pedoman dalam pengkaderan. Padahal melalui pengkaderan, sejatinya merupakan bentuk awal membangun hubungan yang baik karena di

---

<sup>29</sup> Upaya pengambilan kebijakan yang bersifat *bottom up*, bukan *top down* memang sulit untuk dipraktikkan bagi parpol di Indonesia. Hal ini terlihat misalnya dalam hal seleksi caleg, seharusnya antara pengurus partai di tingkat pusat dan tingkat daerah dapat berperan secara proporsional. Artinya, pengurus partai di daerah tidak dapat menyeleksi kandidat tanpa intervensi pimpinan pusat partai sama sekali. Begitu pula pimpinan pusat partai tidak seharusnya menentukan kandidat politisi tanpa ada pertimbangan dari anggota dan/atau pengurus partai di tingkat daerah. Baca selengkapnya, Syamsuddin Haris (ed.), *Pemilu Langsung.... op. cit.*, hlm. 21.

<sup>30</sup> Richard S. Katz, "The Problem of Candidate Selection and Models of Party Democracy," dalam Arya Budi, *Partai: Tantangan Lembaga Demokrasi di Organisasi Demokratis*, Pol-Tracking Institute: Center for Democracy & Leadership Research, Jakarta, 2016, hlm. 12.

dalam proses pengkaderan parpol secara langsung mulai melakukan transfer informasi arah kebijakan partai. Hanya saja, ketidakmampuan dalam melakukan pengkaderan itu yang kemudian berujung pada ketidakharmonisan hubungan. Ironisnya, terputusnya hubungan itu terkadang hanya karena disebabkan soal sepele, seperti perbedaan dukungan dalam pemilu.

Hal di atas, tentu tidak terjadi mana kala parpol mampu membina organisasi sayapnya. Dalam rangka mewujudkan hal itu, salah satunya dapat ditempuh melalui kaderisasi yang baik. Dalam mewujudkan hal tersebut, maka diperlukan bentuk kaderisasi yang menekankan pada aspek internalisasi ideologi, visi dan misi parpol. Tahap ini harus dilakukan secara serius dan kontinyu oleh parpol. Tujuannya ialah agar anggota sayap partai dapat memahami secara komprehensif dasar-dasar ideologi parpol, sejarah parpol, aturan-aturan internal seperti anggaran dasar/anggaran rumah tangga parpol, sehingga anggota sayap partai nantinya tidak mudah berpaling dari parpol yang menaunginya.

Pada prinsipnya, dalam rangka terwujudnya hubungan partai dengan anggota sayapnya berjalan dengan baik ialah agar internal partai untuk bersikap demokratis. Hal ini menjadi penting, mengingat masih rendahnya komitmen elite atau para pemimpin parpol untuk membangun dan melembagakan demokrasi internal partai. Sudah menjadi rahasia umum jika orientasi sebagian politisi parpol era reformasi lebih pada perburuan rente (*rent seeking*) dan jabatan (*office seeking*),<sup>31</sup> ketimbang orientasi menata simpul kepartaian (seperti organisasi sayapnya) untuk menguatkan keberadaan partai untuk jangka panjang.

## **PENUTUP**

Mendasarkan pada pemaparan di atas, dapat disimpulkan bahwa partai di Inggris dan Rumania dalam menjalin hubungan dengan organisasi sayapnya didasarkan pada manajemen kepartaian yang modern dengan menempatkan organisasi sayapnya sebagai simpul yang sangat penting dalam organisasi partai.

---

<sup>31</sup> Syamsuddin Haris, (ed.), *Pemilu Langsung....op. cit.*, hlm. 5.

Praktek baik tersebut, dapat dijadikan formulasi terhadap pola hubungan organisasi sayap partai dengan parpol di Indonesia agar dapat berjalan langgeng. Replikasi formula hubungan organisasi sayap partai dengan parpol tersebut, ialah dengan mengedepankan beberapa aspek penting sebagai berikut: *pertama*, transparansi, yaitu parpol harus bersikap terbuka kepada seluruh anggota sayap partai dalam setiap pengambilan kebijakan. *Kedua*, partisipasi, yaitu parpol dalam pengambilan kebijakan harus terlebih dahulu menyerap aspirasi anggota sayap partai. *Ketiga*, meritokrasi-berjenjang dalam kandidasi pejabat publik, yaitu parpol harus memberikan jaminan bahwa semua anggota sayapnya diberikan kesempatan untuk duduk sebagai pengurus parpol dan kontestasi jabatan publik setelah dilakukan penilaian secara transparan dan akuntabel. *Keempat*, pembangunan militansi melalui kaderisasi, yaitu parpol harus secara kontinyu melakukan kaderisasi yang menekankan pada aspek internalisasi ideologi, visi dan misi serta kebijakan parpol.

## **DAFTAR PUSTAKA**

### **Buku**

- Alistair Clark, *Political Parties in the UK*, Palgrave Macmillan, England-Basingstoke, 2012.
- Arya Budi, *Partai: Tantangan Lembaga Demokrasi di Organisasi Demokratis*, Pol-Tracking Institute: Center for Democracy & Leadership Research, Jakarta, 2016.
- Duncan Watts, *US/UK Government and Politics*, Manchester University Press, Manchester, 2003.
- Firmanzah, *Mengelola Partai Politik: Komunikasi dan Positioning Ideologi Politik Di Era Demokrasi*, Edisi Revisi, Yayasan Obor Indonesia, Jakarta, 2008.
- M. Rusli Karim, *Perjalanan Partai Politik Indonesia, Sebuah Potret Pasang Surut*, Rajawali Pers, Jakarta, 1993.
- Moshe Maor, *Political Parties & Party Systems: Comparative Approaches & the British Experience*, Routledge, London and New York, 1997.
- Phillip Petit, *Republicanism: A Theory Of Freedom And Government*, Clarendon Press, Oxford, 2002.
- S. Mainwaring & T. R. Scully, *Building Democratic Institutions: Party Systems in Latin America*, Stanford University Press, Stanford, CA, 1995.

Syamsuddin Haris (ed.), *Pemilu Langsung di Tengah Oligarki Partai: Proses Nominasi dan Seleksi Legislatif Pemilu 2004*, Gramedia, Jakarta, 2005.

\_\_\_\_\_, *Partai, Pemilu dan Parlemen Era Reformasi*, Yayasan Obor Indonesia, Jakarta, 2014.

Syamsuddin Haris, et.,al, *Panduan Rekrutmen dan Kaderisasi Partai Politik Ideal di Indonesia*, Direktorat Pendidikan dan Pelayanan Masyarakat Kedepujian Pencegahan, Komisi Pemberantasan Korupsi Bekerja sama dengan Pusat Penelitian Politik, Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia, Jakarta, 2016.

### **Hasil Penelitian, Jurnal dan Makalah**

David Sanders, *The UK's Changing Party System: The Prospects For A Party Realignment at Westminster*, *Journal of the British Academy*, 5, 2017.

Redatin Parwadi, *Kaderisasi Organisasi Dalam Perubahan*, *Jurnal Wawasan*, Volume 12, Nomor 1, Juni 2006.

Sunarlan, *Peran Organisasi Under Bouw Partai Politik Di Indonsesia*, Makalah disampaikan dalam seminar yang diselenggarakan oleh PUSKAPSI yang bekerjasama dengan Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia di Hotel Aston, 3 Mei 2017.

### **Media**

Alexandra Barbus, *The Internal Organization of Romanian Political Parties*, dalam [https://www.academia.edu/21090141/The\\_Internal\\_Organization\\_of\\_Romanian\\_Political\\_Parties](https://www.academia.edu/21090141/The_Internal_Organization_of_Romanian_Political_Parties), diakses pada tanggal 07 April 2019.

Alistair Clark, *The role of political parties in the UK*, dalam [http://ls-tlss.ucl.ac.uk/course-materials/PUBLG043\\_73665.pdf](http://ls-tlss.ucl.ac.uk/course-materials/PUBLG043_73665.pdf), diakses pada tanggal 07 April 2019.

E. Kridhaswari, *Sistem Politik di Inggris*, dalam <http://repository.umy.ac.id/bitstream/handle/123456789/18717/f.%20BAB%200II.pdf?sequence=6&isAllowed=y>, diakses pada tanggal 06 April 2019.

Sergiu Gherghina, *The Romanian Political System after 1989*, dalam [https://www.ios-regensburg.de/fileadmin/doc/SOE/SOE\\_2015\\_1\\_Introduction\\_Gherghina.pdf](https://www.ios-regensburg.de/fileadmin/doc/SOE/SOE_2015_1_Introduction_Gherghina.pdf), diakses pada tanggal 06 April 2019.

*Sejumlah Pengurus dan Sayap Partai Nasdem Mundur*, <https://www.republika.co.id/berita/nasional/politik/13/01/29/mhe459-sejumlah-pengurus-dan-sayap-partai-nasdem-mundur>, diakses pada tanggal 26 Maret 2019.

*Labour Party Rule Book 2013*, dalam [www.labourparty.org](http://www.labourparty.org), diakses pada tanggal 05 April 2019.

*List of 'Conservative' Organizations*, dalam [https://www.sourcewatch.org/index.php/List\\_of\\_%27conservative%27\\_organizations](https://www.sourcewatch.org/index.php/List_of_%27conservative%27_organizations), diakses pada tanggal 05 April 2019.



*List of Organisations Associated with the British Labour Party*, dalam [https://infogalactic.com/info/List\\_of\\_organisations\\_associated\\_with\\_the\\_British\\_Labour\\_Party](https://infogalactic.com/info/List_of_organisations_associated_with_the_British_Labour_Party), keduanya diakses pada tanggal 05 April 2019.

*Nick Clegg, why should young people trust you?*, dalam <https://www.youtube.com/watch?v=nBXzVSqM0-Y>, diakses pada tanggal 05 April 2019.

*Political parties need to better integrate young members and give them the chance to influence policy*, dalam [http://eprints.lse.ac.uk/59137/1/\\_lse.ac.uk\\_storage\\_LIBRARY\\_Secondary\\_libfile\\_shared\\_repository\\_Content\\_Democratic%20Audit%20blog\\_2014\\_August%202014\\_democraticaudit.com-Political\\_parties\\_need\\_to\\_better\\_integrate\\_young\\_members\\_and\\_give\\_them\\_the\\_chance\\_to\\_influence\\_policy.pdf](http://eprints.lse.ac.uk/59137/1/_lse.ac.uk_storage_LIBRARY_Secondary_libfile_shared_repository_Content_Democratic%20Audit%20blog_2014_August%202014_democraticaudit.com-Political_parties_need_to_better_integrate_young_members_and_give_them_the_chance_to_influence_policy.pdf), diakses pada tanggal 05 April 2019.

Ramai-ramai Undurkan Diri dari Sayap Partai, Ketua DPW Pemuda Perindo DIY: Karena Dilarang Dukung Pak Jokowi, <https://infonawacita.com/ramai-ramai-undurkan-diri-dari-sayap-partai-ketua-dpw-pemuda-perindo-diy-karena-dilarang-dukung-pak-jokowi/>, diakses pada tanggal 26 Maret 2019.

*The Green Party for a Confident and Caring Britain*, dalam <https://www.greenparty.org.uk/assets/files/gp2017/greenguarantee.pdf>, diakses pada tanggal 05 April 2019.

*The Social Democratic Party (PSD) in Romania Within The Framework of The Romanian and European Left. The PSD Manifesto for The 2016 Parliamentary Elections*, dalam [http://neweurope.centre.ubbcluj.ro/wp-content/uploads/2017/10/On-line\\_Journal\\_No\\_23-September\\_2017\\_46-69.pdf](http://neweurope.centre.ubbcluj.ro/wp-content/uploads/2017/10/On-line_Journal_No_23-September_2017_46-69.pdf), diakses pada tanggal 06 April 2019.

## **BIOGRAFI SINGKAT**

Ali Rido, S.H., M.H merupakan dosen tetap Fakultas Hukum Universitas Trisakti, Jakarta. Secara khusus, konsentrasinya pada bidang Hukum Tata Negara. Selain mengajar, aktif menulis di berbagai jurnal ilmiah, majalah dan koran. Penulis juga aktif mengikuti jamuan ilmiah dalam bentuk seminar, workshop maupun *focus group discussion* baik sebagai narasumber atau peserta.